



## POWER OVER SEXUALITY IN JOSS WIBISONO'S RIJSTTAFEL VERSUS ENTRECÔTE

### KEKUASAAN TERHADAP SEKSUALITAS DALAM CERPEN RIJSTTAFEL VERSUS ENTRECÔTE KARYA JOSS WIBISONO

**Evelin Giovani**

Magister Kajian Sastra dan Budaya, Fakultas Kajian Ilmu Budaya, Universitas Airlangga,  
e-mail: [evelin.giovani-2016@fib.unair.ac.id](mailto:evelin.giovani-2016@fib.unair.ac.id)

---

*Article history:*

*Received*  
29 Januari 2019

*Received in revised form*  
27 Maret 2019

*Accepted*  
22 Mei 2019

*Available online*  
Mei 2019

---

**Keywords:**  
*Power Relation;*  
*Homosexual; Sexuality;*  
*Colonial.*

---

**Kata Kunci:**  
*Relasi Kuasa;*  
*Homoseksual;*  
*Seksualitas; Kolonial.*

---

**DOI:**  
[10.22216/jk.v3i1.3920](https://doi.org/10.22216/jk.v3i1.3920)

---

**Abstract**

*This research is aimed to describe the power of sexuality in Joss Wibisono's Rijnsttafel Versus Entrecôte short story using Foucault's the concept of power juridico-discursive which investigate the negative relation rulers toward homosexual and assertively power some rules by creating cycle of prohibition, censorship, and uniformity of the apparatus. This research was conducted by using qualitative research techniques which analysed the short story Rijnsttafel Versus Entrecôte by Joss Wibisono through a post-structural approach. Data is obtained through hermeneutic reading. Based on the conducted research, it can be concluded that in this short story the power over sexuality was regulated by the Dutch colonial government through the implanatation of inferior idea on the values and culture of Bumiputra; the sexuality policy making that applies to the people of Bumiputra; the creation of discomfort, anxiety, and fear of discuss about homosexuality; and the uniformity of Dutch colonial values over its colonies. The relation between text and actualization in society is the force of power over sexuality that has been going on for a long time and also influenced by the Dutch colonial government's point of view over homosexual.*

---

**Abstrak**

*Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kekuasaan terhadap seksualitas dalam cerpen Rijnsttafel Versus Entrecôte karya Joss Wibisono dengan menggunakan konsep kekuasaan model juridico-discursive Foucault yang digunakan untuk melakukan pembongkaran relasi negatif penguasa terhadap homoseksual, pemaksaan aturan terhadap homoseksual, dengan cara penciptaan siklus larangan, perasionalan sensor, serta penyeragaman aparat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik penelitian kualitatif yaitu analisis terhadap teks cerpen Rijnsttafel Versus Entrecôte karya Joss Wibisono melalui pendekatan post-struktural. Data didapatkan melalui pembacaan hermeneutik. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam cerpen ini kekuasaan atas seksualitas diatur oleh pemerintah Belanda melalui penanaman pandangan inferior pada nilai dan budaya Bumiputra; pembuatan kebijakan atas seksualitas yang berlaku bagi rakyat Bumiputra; penciptaan suasana tidak nyaman, was-was, dan rasa takut ketika membicarakan homoseksual; serta penyegaman nilai-nilai kolonial Belanda atas daerah jajahannya. Relasi antara teks dan aktualisasi dalam masyarakat adalah pemaksaan kekuasaan atas seksualitas telah terjadi sejak lama dan banyak dipengaruhi oleh cara pandang kolonial Belanda terhadap homoseksual.*

---

*Corresponding author.*

*E-mail addresses:* [evelin.giovani-2016@fib.unair.ac.id](mailto:evelin.giovani-2016@fib.unair.ac.id)

## PENDAHULUAN

Sejak tahun 2016 lalu, sebuah kelompok yang menamakan diri Aliansi Cinta Keluarga Indonesia (AILA) telah mengajukan permohonan revisi terhadap beberapa pasal berkaitan dengan asusila dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Salah satu tuntutan AILA adalah mengubah pasal 292 KUHP yang mengatur tindakan pencabulan orang dewasa terhadap anak di bawah umur dari jenis kelamin yang sama. Pasal tersebut diperluas tidak hanya menjerat pencabulan terhadap anak di bawah umur saja tetapi juga kepada semua tindakan hubungan seksual sesama jenis. Sebagian orang setuju terhadap perubahan pasal tersebut, namun sebagian orang menganggap hal tersebut menodai hak-hak seksualitas seseorang.

Kelompok minoritas seperti homoseksual dan waria sering disisihkan dari lingkungan masyarakat karena dianggap memiliki seksualitas yang menyimpang. Upaya mengriminalisasi kelompok homoseksual pun terus terjadi meskipun Mahkamah Konstitusi telah menolak permohonan AILA. Dampak dari permohonan AILA tersebut masih dirasakan bahkan hingga saat ini. Penangkapan terhadap pelaku homoseksual di pelbagai daerah masih sering terjadi seperti yang terjadi pada Maret 2018 lalu, dua orang pria ditangkap warga Aceh dengan dugaan keduanya merupakan homoseksual (Warsito, 2018); kemudian pada Oktober 2018, dua pria ditangkap di Bandung karena membuat grup khusus *gay* di media sosial *Facebook* (Permadi, 2018).

Kriminalisasi kelompok homoseksual di Indonesia sudah berlangsung sejak era penjajahan Belanda. Sebelum kedatangan Belanda di Nusantara, praktik homoseksual telah ada dalam kebudayaan lokal dan tidak dianggap sebagai hal yang aneh. Sikap wajar dapat dilihat salah satunya dalam praktik *gemblak* dibiarkan oleh masyarakat (Hardjomartono dalam Boellstorff, 2005:58). Menurut Boellstorff, *warok* adalah aktor laki-laki dalam seni pertunjukan *reog* di Ponorogo yang dianggap memiliki kekuatan mistik. Kekuatan mistik *warok* dipercaya dapat terus ada selama mereka menghindari hubungan seksual dengan perempuan sehingga untuk tetap dapat melampiaskan hasrat seksualnya *warok* memilih untuk memelihara laki-laki muda yang disebut *gemblak*. *Gemblak* adalah laki-laki muda antara usia delapan hingga enam belas tahun yang dipelihara oleh *warok* sebagai pasangan seksual. Praktik *gemblak* diterima oleh masyarakat karena sering *warok* memberi hadiah-hadiah bagi keluarga *gemblak*nya seperti hadiah berupa sapi dan sandang. Lebih lanjut Boellstorff mengatakan bahwa praktik *warok* justru dilarang sejak era kolonial Belanda.

Pada era kolonial Belanda, kegiatan homoseksual sendiri bukan merupakan kegiatan ilegal di Belanda maupun di Hindia-Belanda, hanya kegiatan homoseksual dengan orang di bawah usia 21 tahun saja yang dianggap sebagai pelanggaran hukum (Aldrich, 2003:198). Skandal homoseksual di Hindia-Belanda diawali pada tahun 1938 ketika seorang koresponden Belanda bernama Fievez de Malines van Ginkel tertangkap tangan sedang berada di kamar hotel bersama laki-laki di bawah umur serta berusaha membawa seorang pemuda bumiputra ke kampung halamannya. Penangkapan terhadap kalangan homoseksual menjadi semakin gencar dilakukan pemerintah kolonial Belanda dengan dukungan Partai politik Kristen yang menginginkan dituntaskannya pengusutan terhadap kegiatan 'penyebaran dosa homoseksual'. Mereka yang terbukti bersalah akan dipindah dari tempatnya bertugas, dihukum penjara, atau bahkan diberhentikan secara tidak hormat sehingga tidak akan mendapat dana pensiun. Penangkapan terhadap homoseksual dapat dilihat sebagai upaya pemerintah membuat regulasi yang mengatur seksualitas warga negaranya. Seksualitas yang idealnya merupakan hak personal ditarik ke ranah umum serta diatur secara ketat. Aturan tersebut dibuat oleh rezim patriarki yang heteronormatif sehingga tidak ada ruang bagi nilai homoseksual yang dianggap menyalahi nilai-nilai yang telah mapan.

Foucault (1978:84) menjelaskan bahwa seks selalu dibungkam dan ditabukan oleh kekuasaan. Foucault melihat bahwa kekuasaan dalam model *juridico-discursive*, kekuasaan dari atas ke bawah yang umumnya terjadi dalam hubungan penguasa atau pemimpin terhadap rakyat adalah model kekuasaan tradisional, berusaha membatasi perilaku termasuk perilaku seksual dengan menciptakan aturan melakukan pelanggaran perilaku tertentu, juga pembatasan terhadap hal-hal yang mengancam hukum. Kekuasaan model *juridico-discursive* Foucault memiliki landasan konseptual yang di antaranya berupa analisis relasi dengan melihat relasi negatif yang muncul, bentuk dari pemaksaan aturan, terciptanya siklus larangan, perasionalan terhadap sensor, dan penyeragaman pemahaman aparat terhadap seksualitas. Menurut Foucault, kekuasaan dengan bentuk tradisional sering muncul dalam hubungan penguasa terhadap rakyatnya. Kekuasaan muncul dalam bentuk pembatasan, pembuatan aturan, dan pemberian hukuman. Karakteristik yang muncul dalam kekuasaan model *juridico-discursive* Foucault adalah:

1. Relasi Negatif

Relasi negatif selalu muncul dalam kekuasaan model *juridico-discursive*. Kekuasaan berusaha menolak dan membatasi segala yang berhubungan dengan seks dan kesenangan.

2. Pemaksaan aturan

Foucault melihat bahwa seks diletakan oleh kekuasaan dalam sistem yang biner seperti diijinkan atau tidak diijinkan juga sah atau tidak sah. Kekuasaan mengharuskan seks dapat diatur dalam hukum karena itulah diciptakan aturan untuk menertibkan seks itu sendiri. Aturan tersebut terkadang dipaksakan agar dapat diterima oleh masyarakat sehingga aturan akan bergandengan dengan hukuman. Maka ketika aturan dilanggar, pelanggarnya akan mendapat hukuman.

3. Siklus larangan

Untuk menghadapi tindakan seksual, kekuasaan akan menggunakan hukum larangan dengan instrumen berupa penindasan terhadap seks. Tujuannya adalah agar seks ditinggalkan. Jika seseorang ingin tetap bereksistensi maka patuhi aturan, jika tidak maka akan menghadapi konsekuensi hukuman.

4. Logika sensor

Logika sensor adalah bentuk dari perasionalan sensor yang diberlakukan. Logika sensor kekuasaan terhadap seks bekerja dalam 3 bentuk: penegasan bahwa hal tersebut tidak diizinkan, pencegahan bahwa topik mengenai hal tersebut tidak akan diperbincangkan, serta penyangkalan bahwa hal tersebut ada. Melalui rasionalisasi sensor, kekuasaan menggiring masyarakat untuk patuh dan mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan serta dibicarakan. Pada akhirnya masyarakat akan menganggap aturan yang berlaku adalah sebuah kewajaran.

5. Keseragaman aparat

Kekuasaan melakukan penyeragaman pemahaman terhadap seks itu sendiri yang beroperasi dalam mekanisme tanpa akhir dan sederhana dari aturan, hukum, tabu, dan sensor. Mekanisme ini akan berlaku dari unit paling kecil seperti keluarga hingga unit yang tertinggi seperti negara, juga dapat melalui hukuman resmi maupun hukuman sosial yang berkembang.

Di Indonesia terdapat beberapa karya sastra dengan gaya penceritaan fiksi sejarah dan tema gender serta seksualitas salah satunya seperti novel Calabai oleh Pepi Al-Bayqunie yang telah diteliti Kusuma, Waluyo, dan Wardani (2018). Sama seperti Calabai, Joss Wibisono berusaha menggambarkan ulang skandal homoseksual di Indonesia pada era kolonial Belanda melalui cerpen *Rijsttafel Versus Entrecôte*. Cerpen tersebut menggambarkan kembali kejadian penangkapan salah satu residen Batavia yang diduga melakukan praktik homoseksual pada tahun 1938. Karya fiksi sejarah tersebut menghadirkan isu seksualitas

dengan penyorotan pemberlakuan larangan hubungan pada pasangan sesama laki-laki dan menihilkan pasangan sesama perempuan oleh pemerintah Kolonial Belanda. Cerpen *Rijsttafel Versus Entrecôte* pada dasarnya tidak hanya bergerak pada wilayah isu seksualitas, namun juga pada isu-isu kolonialisme dan akulturasi. *Rijsttafel* menurut Ganie dalam Rahman (2011:2) merupakan jamuan hidangan makanan Indonesia yang ditata komplet di atas meja makan dengan menu lokal (Jawa) dan Belanda. Sedangkan, *entrecôte* menurut Senn (1898:39) merupakan menu makanan Perancis berupa stik daging yang diambil dari rusuk atau paha dalam sapi.

Cerpen *Rijsttafel Versus Entrecôte* memiliki alur cerita utama mengenai seksualitas rakyat yang diatur ketat oleh penguasa. Hal tersebut menjadikan *Rijsttafel Versus Entrecôte* sebagai bagian dari karya sastra yang secara tepat menggambarkan konsep kekuasaan model *juridico-discursive* Foucault. Relasi kuasa tidakimbang antara pemerintah dalam mengatur seksualitas rakyatnya lebih khusus kepada homoseks diungkapkan dalam bentuk regulasi-regulasi terhadap homoseksual yang ada di dalam cerpen tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan poststrukturalis. Peneliti melakukan pembacaan hermeneutik terhadap teks kemudian mencatat bagian-bagian penting dari teks untuk kemudian dianalisis. Metode yang digunakan untuk menganalisis relasi penguasa dan homoseksual dalam cerpen *Rijsttafel Versus Entrecôte* adalah dengan kerangka konsep kekuasaan model *juridico-discursive* Foucault. Kekuasaan model *juridico-discursive* Foucault dimanfaatkan karena sangat tepat dalam mengungkap fenomena yang terjadi dalam cerpen tersebut. Kerangka konsep *juridico-discursive* Foucault yakni relasi negatif, pemaksaan aturan, siklus larangan, logika sensor, dan keseragaman aparat membantu dalam membedah teks sehingga dapat membongkar kekuasaan terhadap seksualitas dalam cerpen *Rijsttafel Versus Entrecôte*. Analisis pos-struktural digunakan untuk menemukan relasi antara teks dengan fenomena yang terjadi di saat teks tersebut diterbitkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Relasi Negatif

Cerpen *Rijsttafel Versus Entrecôte* mengambil tempat di Batavia era kolonial Belanda. Pemerintahan di Indonesia saat itu berada di bawah kepemimpinan kolonial Belanda sehingga segala aturan yang berlaku adalah aturan Belanda. Orang-orang kulit putih diberikan hak istimewa dibandingkan orang-orang bumiputra sehingga tercipta relasi kuasa yang tidak seimbang (dominatif). Hal ini disebabkan adanya konstruksi identitas budaya yang hierarkis yang menempatkan penjajah ke dalam posisi tertinggi dan yang terjajah berada di posisi terbawah. Penjajah dianggap sebagai superior, pusat, *the self*, beradab, rasional, baik, giat, dan bersuara; sedangkan terjajah berada dalam posisi inferior, pinggir, *the other*, biadab, irasional, buruk, malas, dan diam.

Kekuasaan kulit putih atas orang bumiputra pun muncul dalam bentuk regulasi, salah satunya dalam mengatur seksualitas. Pada saat itu, pandangan masyarakat di Indonesia-dalam hal ini khususnya Jawa-mengenai seksualitas cukup terbuka. Mereka tidak menganggap praktik homoseksual adalah tindakan kriminal. Nilai yang sudah ada dalam masyarakat lokal tersebut digeser dengan hukum kolonial Belanda yakni yang tertera dalam Kitab Undang-undang Hukum Negara Belanda bahwa praktik homoseksual dianggap pelanggaran sehingga memunculkan relasi negatif.

Cerpen *Rijsttafel Versus Entrecôte* pun menggambarkan bagaimana hukum kolonial Belanda mengatur mengenai hubungan seksual sesama jenis. Seorang tokoh pria kulit putih bernama Van Ginkel yang menyewa sebuah kamar di Hotel Des Indies ditangkap atas tuduhan 'skandal mesum'. Tokoh tersebut digiring oleh polisi keluar

*Evelin Giovani : Kekuasaan Terhadap Seksualitas Dalam Cerpen Rijsttafel Versus Entrecôte...*

kamar hotel dengan tangan diborgol bersama seorang pria muda bumiputra. Tokoh utama meyakini bahwa yang mereka saksikan saat itu adalah pelanggaran terhadap hukum kolonial Belanda. Berikut adalah kutipan mengenai penangkapan tokoh Van Ginkel:

*“(...) mereka lihat resident Van Ginkel dalam pakaian acak-acakan sedang melangkah didampingi beberapa polisi, tangannya terborgol. Polisi lain masih mendampingi seorang pria muda bumiputra yang berjalan di belakang toewan resident.” (Wibisono, 2017:73)*

Dari kutipan di atas dapat dilihat bahwa baik tokoh kulit putih maupun tokoh bumiputra ditangkap atas tuduhan praktik homoseksual yang diatur dalam hukum kolonial Belanda. Menurut Rosving dalam Aldrich penangkapan pada homoseksual menunjukkan betapa seksualitas menjadi sangat politis dan betapa politisasi memiliki peran penting dalam represi seksualitas di era kolonial. Nilai-nilai yang ada dalam masyarakat lokal terhadap seksualitas dianggap tidak penting bahkan tidak beradab sehingga nilai-nilai yang harus dianut dan berlaku adalah nilai-nilai Barat yang dianggap berbudaya. Relasi negatif muncul dari hukum kolonial dalam memandang homoseksual.

## 2. Pemaksaan Aturan

Pemerintah kolonial Belanda memandang homoseksual sebagai tindakan tidak bermoral sehingga perlu dibuat sebuah regulasi untuk mengaturnya. Irfan dalam artikel Tirta mengatakan bahwa praktik homoseksual pun akhirnya ditertibkan melalui pengesahan pasal 248b tahun 1911 dalam Kitab Undang-undang Hukum Negara Belanda. Hukum tersebut dipaksakan oleh pemerintah kolonial Belanda kepada seluruh warga negara Belanda serta warga di wilayah jajahannya.

Meskipun pasal yang mengatur homoseksual tersebut telah lama disahkan, namun implementasinya baru benar-benar dijalankan pada tahun 1930-an. Pasal homoseksual menjadi pusat perhatian ketika salah seorang Kepala Bendahara Negara Belanda ditangkap karena berhubungan seks dengan laki-laki di bawah umur. Skandal tersebut akhirnya meluas hingga ke Hindia-Belanda.

Tokoh Ratri pun mempertanyakan regulasi implementasi regulasi terhadap homoseksual yang baru dijalankan setelah sekian lama seperti dalam kutipan berikut:

*“Kenapa baru sekarang pasal 292 wetboek van strafrecht diterapkan? Padahal pasal ini sudah ada sejak 1918. Itu yang banyak dipertanyakan teman-teman sekantor.”*

*“Lewat skandal susila negara kolonial jelas ingin unjuk gigi, bahkan mungkin ini titah sang zijne excellentie sendiri!” (Wibisono, 2017:66)*

Terlihat bahwa Ratri menanggapi sinis regulasi tersebut dengan mengatakan bahwa implementasi pasal homoseksual sebagai sarana pemerintah kolonial Belanda pamer kekuasaan atas Hindia-Belanda.

## 3. Siklus Larangan

Kekuasaan memonopoli ide mengenai suatu hal dan mengatur ketat apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kekuasaan atas seksualitas memunculkan larangan-larangan agar praktik-praktik seks itu sendiri agar ditinggalkan oleh mereka yang melakukannya. Hukum yang melarang homoseksual pada era kolonial Belanda menjadi semakin ketat setelah skandal homoseksual seorang pejabat Belanda terkuak. Hal menarik yang muncul dari aturan tersebut adalah penyempitan arti kata homoseksual yang hanya diartikan sebagai hubungan antar sesama laki-laki sehingga kala itu hubungan antar

*Evelin Giovani : Kekuasaan Terhadap Seksualitas Dalam Cerpen Rijsttafel Versus Entrecôte...*

sesama wanita tidak diatur secara jelas. Aldrich mengatakan larangan hubungan sesama jenis hanya fokus terhadap relasi antar laki-laki saja dikarenakan akar dari regulasi mengenai homoseksual adalah untuk mencegah terjadinya tindakan sodomi (sesama laki-laki) yang dianggap menodai ajaran Kristen.

Menurut Hekma, pada pertengahan awal abad ke-19, subkultur sodomi tidak dianggap sebagai sebuah kejahatan sehingga tidak ada tindakan penangkapan polisi Belanda terhadap mereka yang melakukan sodomi (Hekma, 1991:267). Pada pertengahan akhir abad ke-19, setelah pemerintahan Belanda dikuasai nilai-nilai Kristen, tindakan mengarah pada sodomi dilarang dan resmi diatur dalam hukum negara Belanda pada awal abad ke-20. Aturan mengenai sodomi tersebut kemudian diberlakukan di Hindia-Belanda. Rosving dalam Aldrich mengatakan bahwa penangkapan homoseksual di Hindia-Belanda mendorong orang-orang berpikir hal tersebut bertujuan untuk mendorong nilai moral serta kepercayaan Kristen kepada masyarakat Hindia-Belanda. Regulasi mengenai hubungan sesama perempuan tidak diatur secara jelas.

Perbedaan perlakuan tersebut yang disorot dalam cerpen yakni bentuk perlakuan diskriminasi pada kaum *gay*. Kata homoseksual yang dapat berarti baik hubungan sesama laki-laki maupun hubungan sesama perempuan digambarkan secara eksklusif untuk mendeskripsikan hubungan sesama laki-laki. Hubungan tokoh Lieven dan Ratri yang jelas menunjukkan lebih dari sekadar sahabat tampak jelas disadari oleh banyak orang, namun dianggap sebagai hubungan yang wajar seperti dalam kutipan, *“Dari caranya memandangkan, Paul Seelig sepertinya heran mengapa Lieven berkencan dengan seorang bumiputra, dan bukan kenapa solis altonya ini tidak didampingi seorang pria.”* (Wibisono, 2017:67)

Terlihat bahwa hubungan Lieven dengan perempuan bumiputra dianggap aneh oleh tokoh Paul Seelig, tetapi tidak dengan hubungan sesama perempuan. Tokoh Paul Seelig seolah lebih memperlakukan isu rasial dalam hubungan Lieven dan Ratri, bukan orientasi seksual Lieven.

Ketidakadilan terhadap hubungan sesama laki-laki pun terlihat ketika tokoh Van Ginkel yang dipaksa keluar kamar karena berduaan dengan laki-laki muda bumiputra, sedangkan tokoh Lieven dan Ratri tidak dicurigai sama-sekali. Polisi hanya melewati Lieven dan Ratri yang ikut menonton penggerebekan atas Van Ginkel, *“Salah seorang polisi mengangguk sambil mengucapkan selamat pagi kepada Lieven dan Ratri. Dalam sekejap iring-iringan berlalu.”* (Wibisono, 2017:66)

Hyde dan Delamater berpendapat bahwa terdapat lebih banyak diskriminasi yang didapatkan oleh para pria *gay* dibanding lesbian (Hyde dan Delamater, 2008:341). Keduanya memberi contoh bahwa tidak ada yang aneh ketika dua orang perempuan berbagi kamar apartemen sedang jika pria yang berbagi kamar apartemen maka orang-orang akan mengernyitkan dahi. Tokoh Lieven dan Ratri yang tidak dicurigai sama sekali meskipun memesan satu kamar hotel, berbeda dengan tokoh Van Ginkel yang memesan kamar bersama laki-laki muda.

#### 4. Logika Sensor

Menurut Aldrich, pemerintah kolonial selalu berusaha menunjukkan kuasanya atas daerah jajahan. Mereka selalu ingin tampil superior sehingga ketika atensi publik memandang negatif tindakan ‘orang-orang kulit putih yang beradab’ maka tindakan pertama untuk menanggulangnya adalah dengan membungkam insiden yang terjadi juga mengatur atau memperkecil peluang terjadi masalah agar tidak diperbincangkan kembali.

Logika sensor, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bekerja dalam tiga bentuk: penegasan bahwa hal tersebut tidak diizinkan, pencegahan bahwa topik mengenai hal tersebut tidak akan diperbincangkan, serta penyangkalan bahwa hal tersebut ada.

Logika sensor pemerintah kolonial Belanda terhadap homoseksual muncul dalam bentuk penegasan bahwa homoseksual adalah tindakan terlarang. Masyarakat pun akhirnya dibuat ‘takut’ untuk membicarakan topik-topik maupun melakukan tindakan terkait dengan homoseksual. Rasa was-was ketika ingin membicarakan topik homoseksual muncul juga dalam percakapan antara Lieven dan Ratri seperti berikut:

*“Sepi benar hari ini,” Lieven akhirnya menyinggung soal sedikitnya tamu sambil memandang sekeliling ketika pelayan meninggalkan kami. “Apa benar karena rangkaian penangkapan yang disebut het zedenschandaal itu? Aku dengar salah satunya tertangkap di hotel ini?” Suaranya melirih, nyaris tak tertangkap telinga.* (Wibisono, 2017:65)

Suara lirih Lieven menunjukkan ia berusaha hati-hati ketika membicarakan topik *het zedenschandaal* atau skandal seksual. Ada rasa khawatir pembicaraan mereka didengar oleh orang lain. Pada akhirnya orang-orang seperti Lieven akan digiring untuk menerima aturan bahwa kriminalisasi homoseksual sebagai hal yang wajar.

## 5. Keseragaman Aparat

Tujuan utama dari kekuasaan adalah penerimaan pemahaman yang sama pada seluruh masyarakat. Masyarakat dibuat menerima bahwa homoseksual merupakan tindakan yang buruk dan selayaknya dihukum. Keseragaman aparat muncul dalam cerpen Rijsttafel Versus Entrecôte seperti berikut:

*“... seperti pendapat harian Java Bode yang, dalam mewartakan skandal susila, terus-terusan menulis tentang maatschappelijk gevaar atau sejenisnya.*

*Dengan mengulang-ulang istilah “perkara mesoem” banyak koran berbahasa Melajoe juga tidak tampil mandiri. Meraka terlalu berketat pada peristiwa perburuan kalangan yang dianggap telah melakukan “perkara mesoem” itu, tanpa memperluas wawasan dengan meninjau kemungkinan lain, seperti mengapa baru sekarang dilakukan perburuan, sementara pasalnya sudah 20 tahun lebih.”* (Wibisono, 2017:66-67)

Tokoh Ratri mengatakan bahwa koran *Java Bode* menyebutkan praktik homoseksual sebagai ‘*maatschappelijk gevaar*’ atau ‘berbahaya bagi masyarakat’ menunjukkan kekuasaan kolonial Belanda berhasil menyeragamkan idenya. Aldrich mengatakan bahwa pada era kolonial koran *Jawa Bode* dan *De Ochtendpost* memang pernah menjadikan penangkapan tiga pejabat senior di Surabaya terkait dengan skandal susila sebagai berita utama yang kemudian menjadi sensasional. *Jawa Bode* menyudutkan keberadaan homoseksual dengan menerbitkan nama serta profesi dari orang-orang yang terduga terlibat skandal. Akibat dari pemberitaan tersebut tiga orang laki-laki terduga skandal memutuskan untuk bunuh diri karena tidak kuat menanggung rasa malu. Pembungkahan terhadap praktik homoseksual pada media massa seperti koran baik koran berbahasa Belanda maupun koran berbahasa Melayu saat itu merupakan contoh keberhasilan pemerintah kolonial menyeragamkan ide.

## SIMPULAN

Hasil analisis cerpen Rijsttafel Versus Entrecôte dapat disimpulkan bahwa penguasa dalam hal ini adalah pemerintah kolonial Belanda berhasil menunjukkan kekuasaannya terhadap seksualitas kepada rakyat biasa melalui regulasi-ragulasi yang telah dibuat. Kekuasaan pemerintah kolonial Belanda atas seksualitas yang paling mendasar muncul dalam bentuk ide bahwa nilai-nilai serta budaya yang dimiliki kaum Bumiputra lebih *inferior* dibanding pemerintah kolonial termasuk juga nilai mengenai homoseksualitas; pembuatan

*Evelin Giovani : Kekuasaan Terhadap Seksualitas Dalam Cerpen Rijsttafel Versus Entrecôte...*

aturan yang wajib diberlakukan kepada seluruh rakyat koloni Belanda termasuk daerah jajahannya; menciptakan suasana tidak nyaman, was-was, dan rasa takut ketika membicarakan topik berkaitan dengan homoseksual; menyeragamkan nilai-nilai kolonial Belanda di daerah jajahannya. Jika ditarik benang merah antara teks dan fenomena yang terjadi saat teks diterbitkan, maka dapat disimpulkan bahwa penulis hendak mengkritik pemaksaan kekuasaan atas seksualitas yang banyak dipengaruhi oleh cara kolonial Belanda memandang homoseksual.

### **Daftar Pustaka**

- Aldrich, Robert. 2003. *Colonialism and Homosexuality*. New York: Routledge.
- Boellstorff, Tom. 2005. *Gay Archipelago*. New Jersey: Princeton University Press. <https://ia601302.us.archive.org/25/items/GayArchipelagoIndonesia/Gay-Archipelago-bahasa-Indonesia.pdf>.
- Foucault, Michel. 1978. *The History of Sexuality: An Introduction*. New York: Pantheon Books. [http://download.library1.org/main/780000/ea4a59e8919d0243c89f8a69aa852eea/Michel Foucault - The History of Sexuality%2C Vol. 1\\_ An Introduction -Vintage %281990%29.epub](http://download.library1.org/main/780000/ea4a59e8919d0243c89f8a69aa852eea/Michel%20Foucault%20-%20The%20History%20of%20Sexuality%20-%20Vol.%201%20-%20An%20Introduction%20-%20Vintage%201990%29.epub).
- Hekma, Gert. 1991. "The State , Society , and the Regulation of Sexuality in Modern Europe." *Homosexual Behavior in the Nineteenth-Century Dutch Army* 2(2): 266–88. <https://www.jstor.org/stable/pdf/3704036.pdf?refreqid=search%3A9ea211d7652e0d13835976fd898e8063>.
- Hyde, Janet Shibley, dan John D. Delamater. 2008. *Understanding Human Sexuality*. 10th ed. New York: McGraw-Hill. *Understanding Human Sexuality*.
- Irfan, M. Faisal Reza. 2017. "Pasal Anti-Homoseksual adalah Produk Hukum Belanda." *Tirto*. <https://tirto.id/pasal-anti-homoseksual-adalah-produk-hukum-belanda-cCn3> (Maret 29, 2018).
- Kusuma, Krisna Aji, Herman J. Waluyo, dan Nugraheni Eko Wardani. 2018. "Pengakuan Calabayi: Sebuah Analisis Intertekstual Novel Pasung Jiwa Karya Okky Madasari dan Novel Calabai Karya Pepi Al-Bayqunie". *Jurnal Kata* 2(1):50-65. <http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/kata/article/download/3148/1005>
- Permadi, Agie. 2018. "Buat Grup Gay di Medsos, Pasangan Sejenis Ditangkap." *Kompas*. <https://regional.kompas.com/read/2018/10/19/15493861/buat-grup-gay-di-medsos-pasangan-sejenis-ditangkap> (Oktober 19, 2018).
- Rahman, Fadly. 2011. *Rijsttafel: Budaya Kuliner di Indonesia Masa Kolonial 1870-1942*. Jakarta: Gramedia.
- Senn, Charles Herman. 1898. *Culinary Encyclopaedia: A dictionary of technical terms, the names of all foods, food and cookery auxiliaries, condiments and beverages*. London: Spottiswoode and Co.
- Warsito, Budi. 2018. "Dua Pria Diduga Pasangan Gay Digrebek Warga Saat 'Berduaan.'" *Jawapos*. <https://www.jawapos.com/jpg-today/29/03/2018/dua-pria-diduga-pasangan-gay-digrebek-warga-saat-berduaan> (Maret 29, 2018).
- Wibisono, Joss. 2017. "Rijsttafel Versus Entrecôte." dalam *Rumah Tusuk Sate di Amsterdam Selatan*, Yogyakarta: Oak.